

PERATURAN DAERAH BERNUANSA SYARIAH DI KABUPATEN BONE

(Telaah Atas Hukum Tatanegara Islam)



Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Pada Fakultas Syariah dan Hukum**

Oleh:

ASRIANA

NIM: 10200116091

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asriana
NIM : 10200116091
Tempat/Tgl. Lahir : Tanacabi, 30 Juni 1997
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Samata
Judul : Peraturan Daerah Bernuansa Syariah di Kabupaten Bone
(Telaah atas Hukum Tata Negara Islam)

Penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 20 juni 2017

Penyusun,

ASRIANA
NIM : 10200116091

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Peraturan Daerah Bernuansa Syariah di Kabupaten Bone (Telaah Atas Hukum Tatanegara Islam)” yang disusun oleh Asriana, NIM : 10200116091, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu 18 November 2020 M, bertepatan dengan 3 Rabiul Akhir 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) dengan beberapa perbaikan.

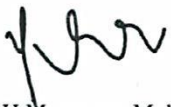
Samata, 18 November 2020 M
3 Rabiul Akhir 1442 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag
Sekretaris : Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag
Pembimbing I : Prof. Dr. Usman, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Sohrah, M,Ag
Penguji I : Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A
Penguji II : Dr. Rahma Amir, M.Ag

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui Oleh :
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Alauddin Makassar


Dr. H Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag
NIP : 19731122 200012 1 002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas Rahmat, Hidayah, Petunjuk dan izin-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **Peraturan Daerah Bernuansa Syariah di Kabupaten Bone (Telaah Atas Hukum Tata Negara Islam)**” yang mana merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tak lupa pula shalawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawahkan kita dari zaman jahiliyah menuju alam yang penuh teknologi ini, yang telah menggulung tikar-tikar kebodohan dan menghamparkan permadani-permadani pengetahuan.

Tulisan ini didedikasikan untuk kedua orang tua penulis yakni Bapak **H. Anggu** dan Ibu **Hj. Mayang** yang tak henti-hentinya mendoakan dan selalu mengarahkan segala usaha, baik dari segi moril maupun materil demi kelancaran studi penulis. Kepada saudara penulis **Arisman** yang senantiasa membantu penulis dalam setiap keadaan. Terima kasih atas segalanya semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan dan pahala yang berlipat ganda atas kebaikan yang telah dicurahkan kepada penulis.

Proses penyelesaian skripsi tidaklah terlepas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis dalam kesempatan ini menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. H. Hamdan Juannis MA. PhD**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak **Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

3. Ibu **Dr. Kurniati S.Ag.**, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara.dan Ibu **Dr. Hj. Rahmiati, S.Pd., M.Pd** sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Tatanegara.
4. Bapak **Prof. Dr. Usman, M.Ag** selaku pembimbing I dan Ibu **Dr. Hj. Sohrah, M.Ag.** selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya memberikan arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih banyak.
5. Bapak **Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A.** selaku penguji I dan Ibu **Dr. Rahma Amir, M.Ag.** selaku penguji II yang senantiasa memberikan respon positif dan masukan- masukan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih banyak.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Jurusan Hukum Tata Negara yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis. Terima kasih banyak.
7. Seluruh staf akademik dan jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan bantuan jasa dalam bidang keadministrasian kepada penulis selama menjadi mahasiswa. Terima kasih banyak.
8. Keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil. Terima kasih banyak
9. Kepada **Kak Mail S.H**, yang begitu baik dan sabar yang senantiasa membantu penulis dengan ikhlas dalam proses penyelesaian tugas akhir ini terima kasih banyak.
10. Kepada saudara penulis diperantauan “Pada Idi” saudari **Indo Esse** dan saudara **Muhammad Arfan** yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan sampai penyelesaian tugas akhir ini, terima kasih atas segala bantuanya kuharap persaudaraan kita kemarin, saat ini, dan selamanya.
11. Kepada kak **Satriani,S.H**, **Zulfiani Syam,S.H** dan **Marnawati**, yang senantiasa memberikan keceriaan, semangat beserta doa kepada penulis. Terima kasih banyak.

12. Kepada **Aldi Darmadani, A.md.Ds** yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini. Terima kasih banyak.
13. Kepada kak **Suhartono, S.H**, kak **Mustika Anwar S.Ag**, kak **Iskar, S.Sos**, yang telah membantu dan mendampingi penulis dari awal-awal perkuliahan. Terima kasih banyak.
14. Kepada teman-teman HTN C dan Keluarga besar Hukum Tatanegara terima kasih atas kebersamaan dan bentuk persaudaraannya.
15. Kepada informan yang telah memberikan informasi terkait judul yang diangkat peneliti, terima kasih banyak.
16. Seluruh pihak yang sedikit banyak berkontribusi atas penyelesaian penelitian dan skripsi ini yang tidak mampu disebutkan satu-persatu. Terima kasih banyak.

Demikian tugas akhir ini penulis buat, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya mahasiswa/I Jurusan Hukum Tatanegara. Penulis sadar bahwa penulisan ini skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun dari pembaca sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan kedepannya.

Samata, 19 September 2020

Penulis,

ASRIANA

NIM: 10200116091

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	8
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	13
BAB II TINJAUAN TEORITIS	15
A. Peraturan Daerah	15
1. Pengertian Peraturan Daerah	15
2. Peraturan Daerah Bernuansa Syariah.....	16
3. Konsep Pembentukan Peraturan Daerah.....	17
B. Otonomi Daerah	29
1. Pengertian Otonomi Daerah	29
2. Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat dan Daerah.	29
3. Pemerintahan Daerah dengan Sistem otonomi	33
C. Telaah Atas Hukum Tatanegara Islam	
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	42

A. Jenis dan Lokasi Penelitian	42
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Sumber Data	44
D. Metode Pengumpulan Data	44
E. Instrumen Penelitian	45
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	46
G. Pengujian Keabsahan Data	47
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
B. Pemberlakuan Perda Bernuansa Syariah di Kabupaten Bone	54
C. Hambatan pelaksanaan Perda Bernuansa Syariah di Kabupaten Bone	63
D. Telaah Atas Hukum Tatanegara Islam	68
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Implikasi Penelitian	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAN HIDUP

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel beriku :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
Y	Ya		Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	A
اِ	<i>Kasrah</i>	i	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>fathah dan yaa'</i>	Ai	a dan i
اُوْ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	Fathah dan alif atau yaa'	a	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan yaa'	i	i dan garis di atas

وُ	Dhammmah dan waw	u	u dan garis di atas
----	---------------------	---	---------------------

Contoh:

مات : *maata*

رَمَى : *ramaa*

قِيلَ : *qiila*

يَمُوتُ : *yamuutu*

4. *Taa' marbuutah*

Transliterasi untuk *taa' marbuutah* ada dua, yaitu *taa' marbuutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dhammah*, transliterasinya adalah [t].sedangkan *taa' marbuutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *taa' marbuutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *taa' marbuutah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh :

الْأَطْفَالِ الرَّوضَةُ : *raudah al- atfal*

الْفَاضِلَةُ الْمَدِينَةُ : *al- madinah al- fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanaa*

نَجَّيْنَا : *najjainaa*

الْحَقُّ : *al- haqq*

نُعَمَّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf **ي** ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (**يِ**) maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* menjadi *i*.

Contoh :

عَلِيٍّ : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ال** (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلَسْفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'muruuna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa

Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'an*), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fizilaal Al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. Lafz al- Jalaalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

بِإِلَهِ اللَّهِ *diinullah* بِإِلَهِ اللَّهِ *billaah*

Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalaalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh :

hum fi rahmatillaah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh:

Wa ma muhammadun illaa rasul

Inna awwala baitin wudi' alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan

Syahrul ramadan al-lazii unzila fih al-Qur'a

Nazir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al- Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu)
 Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt. = *subhanallahu wata'ala*

saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
r.a	= <i>radiallahu 'anhu</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
QS.../...4	= QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Al-Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

ABSTRAK

NAMA : ASRIANA

NIM : 10200116091

JUDUL :PERATURAN DAERAH BERNUANSA SYARIAH DI KABUPATEN BONE (TELAAH ATAS HUKUM TATANEGARA ISLAM)

Pokok masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana peraturan daerah bernuansa agama (syariah) di Kabupaten Bone, dan adapun rumusan masalahnya: 1) Mengapa peraturan daerah bernuansa syariah diberlakukan di Kabupaten Bone? 2) Bagaimana hambatan atau kendala dalam pelaksanaan peraturan daerah bernuansa syariah di Kabupaten Bone? 3) Bagaimana Telaah atas hukum tatanegara islam terhadap peraturan daerah bernuansa syariah di Kabupaten Bone?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) kualitatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu: yuridis, sosiologis, normatif syar'I, adapun sumber data penelitian ini adalah data primer dengan wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,dan wawancara. Lalu teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan dengan tahap, yaitu: klasifikasi data, editing data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pemberlakuan Peraturan Daerah bernuansa syariah di Kabupaten Bone dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat, merupakan bentuk respon pemerintah Kabupaten Bone terhadap adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, yang menganggap bahwa undang-undang tersebut belum efektif dan memerlukan peraturan pelaksanaan lebih lanjut di tingkat Kabupaten Bone, diberlakukanya aturan tersebut guna menjadi payung hukum dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Bone sehingga pengelolaan zakat lebih optimal dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama untuk menuntaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Hal ini juga relevan dengan masyarakat Kabupaten Bone yang mayoritas muslim yang membutuhkan jaminan hak-hak beragama yang bersumber dari nilai-nilai dan norma-norma agama islam. 2)

Hambatan atau kendala pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pengelolaan zakat oleh pemerintah dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat oleh pemerintah serta lemahnya sanksi terhadap wajib zakat. 3) Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Bone sejalan dengan hukum tatanegara islam dimana pemimpin atau penguasa sebagai khalifa Allah swt diperintahkan untuk menegakkan hukum Allah untuk mengatur kehidupan masyarakat. Dengan adanya aturan yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Bone untuk pengelolaan zakat, membenarkan adanya intervensi dan peran pemerintah untuk mengelolah dengan tujuan mensejahterakan dan melindungi terhadap kepentingan publik.

Implikasi dalam penelitian ini adalah 1) Pemerintah daerah khususnya pemda Kabupaten Bone dituntut tentang prinsip-prinsip pembentukan perda agar tidak terjadi peraturan yang tumpang tindih atau saling bertentangan dengan peraturan lainnya. Dan peraturan yang dibentuk betul-betul aspirasi masyarakat. Selama aspirasi tersebut sejalan dengan kaidah yang berlaku maka laksanakan, dan jika tidak maka taati kaidah hukum yang berlaku. 2) Peningkatan ketaatan menunaikan zakat dapat dilakukan dengan sosialisasi secara berskala tentang kewajiban menunaikan zakat serta mamfaat dan pentingnya menyalurkan melalui lembaga yang disediakan oleh pemerintah sehingga terwujud kesadaran menunaikan zakat, ditambah transparansi pendistribusian zakat sehingga timbul kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat. 3) Islam dan setiap muslim yang taat terhadap agama islam menghendaki agar hukum islam dapat dilaksanakan secara menyeluruh dalam sendi kehidupan. Terhadap beberapa aturan hukum islam yang implementasiannya membutuhkan kehadiran pemerintah. Sehingga pemerintah berperan penting dalam menjalankan hukum islam. Tetapi hukum Indonesia masih terbilang kurang dari jumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang norma-norma agama serta minimnya kewenangan-kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang materi muatannya mengatur tentang norma-norma agama. Kurangnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang norma-norma agama seharusnya menjadi dorongan bagi umat muslim Indonesia untuk ikut serta dalam pembentukan peraturan perundang-undngan secara aktif sebagai wakil umat muslim dipemerintahan sehingga dapat dibentuk aturan hukum yang dapat menjawab kebutuhan hukum umat islam Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar yang terletak di posisi strategis dengan dua lautan yang mengelilinginya. Tidak hanya kondisi goeografisnya yang luas, tetapi Indonesia juga dikenal dengan keberagaman dan kemajemukan warga Negaranya baik dari suku bangsa, ras, etnis, budaya maupun agama. Hal ini tentu turb ut mempengaruhi mekanisme pemerintahan di Indonesia, dimana sulitnya koordinasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Sejarah mencatat bahwa arus reformasi telah bergulir di Indonesia mulai Tahun 1998. Reformasi menuntut adanya Demokratisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Dan salah satu akibat dari arus reformasi yang paling mendasar adalah dalam hal sistem pemerintahan yang tidak lagi sentralistik. Kini daerah memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar demokrasi yang selalu menuntut dan mengharuskan adanya pemecahan kekuasaan, agar kekuasaan tidak terpusat.

Proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentraalisasi disebut pemerintah daerah dengan otonomi, otonomi adalah penyerahaan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan, tujuan otonomi ialah mencapai efektifitas dan efisiensi dalam

pelayanan kepada masyarakat.¹ Diharapkan dengan adanya perubahan sistem ini dapat memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, pemerintah daerah berwenang mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas dan tugas pembantuan, pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat, disamping itu melalui otonomi luas daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi serta keanekaragaman daerah dalam NKRI.²

Dengan adanya pelimpahan otonomi kepada pemerintah daerah maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang kemudian diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Namun seiring dengan perkembangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti dan disempurkan, maka dibentuklah Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku sampai saat ini.

¹HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h.17.

²HAW Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, h. 131.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang luas dalam pengelolaan dalam daerahnya, dengan adanya kewenangan ini, maka pemerintah daerah dapat membuat peraturan daerah (perda) yang disesuaikan dengan tingkatannya dan kebutuhan bagi daerah serta keunikan daerah masing-masing.

Peraturan daerah tersebut harus memenuhi batas-batas kewenangan yang telah ditentukan dan keterikatan-keterikatan dalam hubungannya dengan pemerintah pusat.³ Batas-batas kewenangan dan keterikatan dalam hubungannya dengan pemerintah pusat diwujudkan dalam bentuk pengawasan, yaitu pengawasan preventif, pengawasan represif dan pengawasan umum.

Menurut tingkatannya perda dibagi atas dua macam yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan peraturan daerah Kabupaten/Kota. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, dalam pasal 1 angka 7, bahwa Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD) bersama dengan Gubernur. Adapun perda Kabupaten/kota tertuang dalam pasal 1 angka 8, adalah peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pembentukan perda harus

³Misdayanti dan kartasapoetra, *Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah* (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara,1993), h.28.

mencangkup dua unsur pembentuk, yakni badan legislatif (DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota) dan badan eksekutif (Gubernur atau Bupati/Walikota).⁴

Salah satu ciri penyelenggaraan Negara secara demokratis ialah memberikan hak kepada masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses pembuatan suatu peraturan daerah. Namun tidak dipungkiri bahwa kemajemukan warga Negara Indonesia baik dari suku bangsa, ras, etnis, budaya maupun agama, tentu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam hal mengurus urusannya di setiap daerah, yang dituangkan dalam peraturan daerah masing-masing. Dan yang paling signifikan adalah bahwa pembentukan suatu produk hukum di daerah sangat dipengaruhi dengan jumlah mayoritas penduduk. Contohnya mayoritas masyarakat di Kabupaten Bone yang beragama islam memiliki pengaruh sangat kuat di daerah. Pengaruh tersebut dapat kita lihat dengan lahirnya produk hukum yang berasal dari nilai-nilai islam atau bernuansa syariah (syariah Islam).

Menjadi unik dalam peradaban hukum modern bahwa peraturan daerah memungkinkan diri untuk meresap dan mengatur domain privat masyarakatnya. Akan tetapi hal ini menjadi rasional dan relevan mengingat kompleksitas agama Islam dalam mengikat dan melekatkan setiap person penganutnya. Ikatan kompleks ini tertuang dalam satu wadah yang familiar disebut syariat dalam wawasan Islam.

Eksistensi peraturan bernuansa syariah tidak hanya dituangkan dalam perda saja tetapi juga dalam rancangan strategis, intruksi atau edaran Bupati dan surat

⁴Republik Indonesia, “*Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan*”, bab 1, pasal 1

keputusan. Sesuai dengan catatan Ditjen peraturan Perundang-Undangan bahwa Saat ini perda yang bernuansa syariah yang telah diundangkan di Kabupaten Bone yaitu perda No. 13 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam pemberlakuan perda ini Pemerintah Kabupaten Bone melihat bahwa Kabupaten Bone adalah Kabupaten yang masyarakatnya mayoritas muslim. Dan zakat merupakan salah satu ibadah yang bersifat mutlak bagi setiap orang islam, yang mewajibkan mengeluarkan sebagian harta tertentu dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.

Lahirnya perda bernuansa agama (syariah) menimbulkan berbagai pandangan dikalangan masyarakat, praktisi, dan politisi, sebagian berpendapat bahwa perda yang bernuansa syariah merupakan peraturan yang menimbulkan ketidakadilan, diskriminasi, dan toleransi, serta hanya menguntungkan kaum mayoritas dan merugikan kaum minoritas dan hal ini dianggap berpotensi melahirkan perpecahan bangsa. Sedangkan yang pro dengan adanya perda bernuansa syariah menyatakan bahwa perda bernuansa syariah merupakan wacana demokratisasi yang merupakan aspirasi masyarakat daerah, sehingga setiap daerah berhak membuat peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan ciri khas daerahnya.

Peraturan daerah bernuansa syariah sering sekali dianggap bermasalah apabila dipandang dari segi pembuatannya, dimana terpadat tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam hal ini pembuatan peraturan daerah(perda), yang berfungsi sebagai sarana penampung kondisi khusus di

daerah, dimana perda tersebut harus menjadi fasilitas hukum yang dapat menyalurkan aspirasi masyarakat daerah berdasarkan ciri khas atau kondisi sosial budaya dan hukum(adat atau agama) yang ditaatinya. Tentu hal itu bertentangan dengan peraturan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam undang-undang ini telah mengatur mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Adapun kewenangan pemerintah pusat yaitu: 1.) Urusan politik luar negeri, 2.) Pertahanan Keamanan, 3.) Yustisi, 4.) Moneter dan Fisika Nasional, 5.) Agama. Melihat dari kewenangan pemerintah pusat tersebut bahwa agama adalah salah satu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dan belum diotonomikan ke daerah. Jadi peraturan daerah yang bernuansa syariah sering kali dianggap bermasalah dan merupakan bentuk pelampauan batas kewenangan pemerintah daerah yang telah melanggar konstitusional Negara ini.

Pada hakikatnya perda dalam sistem perundang-undangan nasional merupakan justifikasi terhadap eksistensi perda yang tidak terlepas dari hierarki peraturan perundang-undangan(UU NO. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), dimana menempatkan posisi perda dibawah UUD 1945, undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang(PERPU), peraturan pemerintah dan peraturan presiden.

Melihat penjelasan diatas mengenai hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Undangan, bahwa secara hakikat perda adalah bagian dari sistem perundang-

undangan nasional, yang menempatkan perda sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh sebab itu kewenangan yang luas yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan ataupun keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Artinya tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Sebagaimana dalam pembentukan perundang-undangan terdapat asas “*lex superiori derogate legi inferiori*” yaitu perundang-undangan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Hal ini disebabkan karena peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional.⁵

Melihat pemaparan diatas sangat menarik untuk ditelaah mengenai perda bernuansa syariah yang ada di Kabupaten Bone, dilihat dari segi pembentukannya apakah tuntutan *socio-religi* ataukah keberadaannya hanya bagian dari alat rekayasa sosial, dan bagaimana dengan jajaran hierarki perundang-undangan Indonesia serta apakah keberadaannya tidak bermasalah secara konstitusi.

Berangkat dari latarbelakang yang diuraikan diatas, maka penulis mengangkat sebuah judul yang menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang

⁵Jumadi, *Dasar Dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan* (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 79.

berjudul: **“PERATURAN DAERAH BERNUANSYA SYARIAH DI KABUPATEN BONE (TELAAH ATAS HUKUM TATANEGARA ISLAM)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dirumusan pokok masalah sebagai berikut: Bagaimana Peraturan daerah bernuansa syariah di Kabupaten Bone (Telaah atas Hukum Tatanegara Islam)?

1. Mengapa peraturan daerah bernuansa syariah diberlakukan di Kabupaten Bone?
2. Bagaimana hambatan atau kendala dalam pelaksanaan peraturan daerah bernuansa syariah di Kabupaten Bone?
3. Bagaiman Telaah atas Hukum tata negara islam terhadap peraturan daerah bernuansa syariah di Kabupaten Bone.

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka tercapailah fokus penelitian sebagai berikut:

- a. Peraturan daerah bernuansa syariah yang ada di Kabupaten Bone;
- b. Telaah atas hukum tatanegara islam terhadap peraturan daerah benuansa agama (syariah) di Kabupaten Bone.

2. Deskripsi Fokus

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam penafsiran pembaca dalam variable-variabel atau kata-kata dan istilah-istilah teknis yang terkandung dalam point-point fokus tersebut, maka fokus penelitian tersebut terdahulu dideskripsikan lebih lanjut sebagai berikut:

Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) dengan persetujuan DPRD yang materi muatannya untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan di atasnya dengan memperhatikan ciri khas daerah masing-masing.

Bernuansa syariah merupakan suatu keadaan dimana menerapkan unsur-unsur atau nilai-nilai agama (Syariat Islam). Adapun dalam penulisan skripsi ini, kata bernuansa syariah disandingkan dengan kata perda sehingga menjadi sebuah frasa tersendiri yaitu peraturan daerah bernuansa syariah. Frasa perda bernuansa syariah diangkat sebagai representasi dari peraturan daerah di Kabupaten Bone yang memiliki materi muatan yang bersinggungan dengan pengaturan kehidupan beragama masyarakat muslim sehingga dipersepsikan sebagai perda bernuansa syariah yakni Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan zakat.

Adapun hukum tatanegara islam (siyasah syar'iyah) merupakan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Definisi ini oleh Abdurahman Taj yang merumuskan hukum tatanegara islam atau siyasah syar'iyah sebagai hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasikan permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan.⁶

D. Kajian Pustaka

Setelah mempelajari beberapa referensi yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa literatur diantaranya sebagai berikut:

1. H. Siswanto Sunarso dalam bukunya Hukum pemerintahan Daerah di Indonesia Cet.1:Jakarta;Sinar grafika, dalam buku ini membahas mengenai pemerintahan daerah, yang meliputi asas-asas otonomi daerah, struktur pemerintah daerah yang meliputi DPRD, kepala daerah, perangkat desa, keuangan daerah, dan kepegawaian daerah. Buku ini membantu penulis untuk memahami sistem pemerintahan daerah. Namun secara keseluruhan belum membahas secara mendalam mengenai peraturan daerah.
2. Rozali Abdullah dalam bukunya Pelaksanaan Otonomi luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2005, dalam buku ini membahas mengenai perkembangan otonomi daerah mulai dari

⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), h. 5.

latar belakang lahirnya UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sampai hal-hal yang diatur dalam UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Buku ini lebih terkhusus membahas mengenai aturan suatu pemerintahan daerah, dan belum membahas secara mendalam mengenai penerapan suatu peraturan daerah dan bagaimana dampak yang terjadi dalam masyarakat.

3. Andi Pangeran Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, Ed.1, Cet. 2; Depok Rajawali Pers,2018, buku ini membahas pokok-pokok dalam pemerintahan daerah meliputi pembagian urusan pemerintahan, penataan daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah, DPRD, perangkat daerah, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
4. Jumadi dalam bukunya Dasar dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2017, dalam buku ini dijelaskan secara terperinci mengenai pembentukan suatu produk hukum. Buku ini sangat membantu penulis dalam memahami mengenai peraturan daerah, mulai dari sejarah dan perkembangan perda, kedudukan dan fungsi perda, sampai dengan tata cara penyusunan peraturan perda itu sendiri.
5. Misdayanti dan Kartasapoetra dengan judul buku Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah, Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara,1993, buku ini membahas mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam pembuatan suatu produk hukum dalam hal ini peraturan daerah(Perda). Namun buku ini

belum membahas apabila terdapat produk hukum yang bertentangan dengan konstitusi Negara.

6. La Ode Husen dalam bukunya Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan kekuasaan, Ed.I., Cet. I; Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, 2009. Buku ini membahas mengenai bagaimana pertumbuhan hukum yang terus berkembang sesuai dinamika kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, yang meliputi teori Negara hukum, teori demokrasi, teori pemisahan kekuasaan, pengawasaan kekuasaan dan kekuasaan kehakiman.
7. Masykury Abdillah dalam bukunya islam dan demokrasi respons intelektual muslim Indonesia terhadap konsep demokrasi 1966-1993, Cet.1; Jakarta: Kencana, 2015. Buku ini membahas mengenai hubungan antar islam Negara dan bagaimana respon umat islam terhadap demokrasi baik mengenai konsep demokrasi dan hak-hak asasi manusia serta bagaimanapun peran muslim dalam proses demokratisasi.
8. Alwi Bik Peraturan daerah syariah dalam bingkai otonomi daerah, al-daulah: jurnal hukum dan perundangan islam volume 3, nomor 2, jurnal ini membahas mengenai otonomi yang luas yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah yang harus memperhatikan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam Negara kesatuan republik Indonesia serta membahas mengenai keberlakuan hokum di Indonesia. Namun jurnal ini belum memberikan gambaran perda syariah secara mendalam.

9. Abd. Rais Asmar Pengaturan Peraturan Daerah (Perda) Syariah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, El-Iqtishady | Volume 1 Nomor 1, dalam jurnal ini membolehkan pemberlakuan perda bernuansa syariah karena bagaimanapun juga suatu perda harus disesuaikan dengan kondisi nyata dalam daerah tersebut. Namun jurnal ini belum membahas apabila diterapkan perda syariah dalam suatu daerah bagaimana dengan HAM kaum minoritas yang ada di daerah tersebut dan berbagai dampak yang ditimbulkannya.

Dari beberapa referensi diatas baik dari perseorangan maupun kelompok tidak satupun membahas secara mendalam mengenai judul yang diangkat penulis. Oleh karena itu penulis meneliti secara mendalam mengenai Peraturan daerah bernuansa syariah di Kabupaten Bone (Telaah atas Hukum Tatanegara Islam).

E. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui mengapa peraturan daerah bernuansa syariah diberlakukan di Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan dan rintangan dalam pelaksanaan peraturan daerah bernuansa syariah di Kabupaten Bone.
3. Untuk mengetahui telaah atas hukum tata negara islam terhadap peraturan daerah bernuansa syariah di Kabupaten Bone.

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menghasikan daya guna sebagai berikut:

1. Diharapkan agar dapat memberikan sumbangsi pemikiran kepada masyarakat tentang masalah peraturan daerah yang bernuansa syariah dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat di Kabupaten Bone.
2. Diharapkan dijadikan sebagai bahan rujukan untuk pembentukan peraturan daerah kedepannya.
3. Diharapkan penelitian ini dijadikan bahan oleh orang-orang yang berkompeten, khususnya pemerhati masalah hukum tatanegara.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Peraturan Daerah

Jimly Asshissiqie menjelaskan bahwa dalam desentralisasi politik atau *staatskundige decentralisati* terjadi pelimpahan kekuasaan dibidang perundang-undangan dan bidang pemerintahan atau *regelende en besturende bevoegheiden* kepada unit-unit pemerintahan daerah otonom.⁷ Dalam pelimpahan kekuasaan di bidang perundang-undangan, peraturan daerah sebagai produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dalam relasi kemitraan antara eksekutif dan legislative menjadi cerminan dari manfaat otonomi daerah.

1. Pengertian Peraturan Daerah (PERDA)

Perda (peraturan Daerah) merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD yang materi muatannya untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan di atasnya dengan memperhatikan ciri khas daerah masing-masing.⁸

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan, dalam pasal 1 butir 7,” *Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan*

⁷Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 295.

⁸Jumadi, *Dasar dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan*, h. 75.

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan gubernur”. Adapun perda Kabupaten/kota tertuang dalam pasal 1 butir 8, ” *Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.*⁹ Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pembentukan perda harus mencakup dua unsur pembentuk, yakni badan legislatif (DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota) dan badan eksekutif (Gubernur atau Bupati/Walikota)

2. Pengertian Peraturan Daerah Bernuansa syariah

Dalam sudut pandang legal formal, istilah perda bernuansa syariah sejatinya tidak dikenal dalam hukum positif. Dalam tataran hukum positif produk legal formal pemerintah daerah hanya berupa perda saja, sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 8 ayat (6) UUD 1945 menyebutkan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Begitu juga dengan undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak menjelaskan mengenai perda bernuansa syariah melainkan hanya peraturan daerah (perda).

Namun dapat disimpulkan bahwa Peraturan daerah bernuansa syariah adalah peraturan daerah yang biasa, yang kemudian dikembangkan dengan berlandaskan hukum agama islam yang bersumber dari Al-quran dan Al-hadist, dimana materi muatannya mengandung unsur dan nilai adat istiadat dan norma agama.

⁹Republik Indonesia, “*Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan*”, bab 1, pasal 1

3. Konsep Pembentukan Peraturan Daerah

Hans Kelsen mengemukakan Konsep pemberlakuan hukum dalam hukum ketatanegaraan Indonesia menganut teori berjenjang (*Stufen Bow Theory*). Teori tersebut mengandung ajaran sebagai berikut : Pertama dasar berlakunya dan legalitas suatu norma terletak pada norma yang ada di atasnya, dalam system hukum Indonesia dikenal dengan hierarki peraturan perundang-undangan (pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). kedua, suatu norma menjadi dasar berlakunya legalitas norma yang ada dibawahnya. Ketiga, secara diambil dari dua norma saja, bisa dari atas kebawah atau dari bawah ke atas.¹⁰

Teori berjenjang ini kemudian menimbulkan asas hukum *lex supprior derogat lex infreriori* (hukum yang dibawah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang ada diatasnya). Berdasarkan teori ini maka peraturan Perundang-undangan yang berada dibawah harus sejalan dengan peraturan diatasnya.¹¹

Peraturan daerah adalah salah satu bentuk peraturan pelaksana undang-undang. Pada pokoknya, kewenangan mengatur bersumber dari kewenangannya yang ditentukan oleh pembentuk Undang-undang. Akan tetapi dalam hal-hal tertentu, peraturan daerah dapat mengatur sendiri hal-hal yang meskipun tidak didelegasikan secara eksplisit kewenangannya oleh Undang-undang, tetapi dianggap perlu diatur

¹⁰Bachan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 117.

¹¹Bachan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, h. 117.

oleh daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya.¹² Dengan kata lain disamping untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang, ataupun untuk menjabarkan lebih lanjut materi ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.¹³

Dalam menjabarkan kewenangan daerah ada pembatas yang harus ditaati yakni setiap peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi. Sebagaimana mana tataurutan atau hierarki peraturan perundang-undangan yang disebutkan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR);
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah (PP);
- e. Peraturan Presiden (Perpres);
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan susunan atau hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, maka peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Karena berdasarkan susunan hierarki tersebut peraturan daerah berada dibawah UUD, TAP MPR,UU, PP dan PERPRES, oleh

¹²Jimly Asshiddiqei, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Sekretariat Mahkamah Konstitusi, 2006), h. 190.

¹³Jimly Asshiddiqei, *Perihal Undang-Undang*, h. 143.

karena itu muatan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya, hal ini sejalan dengan asas yang menyatakan bahwa undang-undang yang dibawah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berada diatas.¹⁴

Pembentukan peraturan daerah harus pula berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Hamid S. Attamimi berpendapat, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut: ¹⁵

1. Cita hukum Indonesia, yang tidak lain adalah pancasila yang berlaku sebagai “bintang pemandu”.
2. Asas Negara berdasarkan atas hukum yang menempatkan Undang-Undang sebagai alat peraturan yang khas berada dalam keutamaan hukum, dan asas pemerintahan berdasarkan Sistem Konstitusi yang menempatkan Undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pemerintahan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut itu meliputi juga:

- a. Asas tujuan yang jelas;
- b. Asas perlunya pengaturan;
- c. Asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;

¹⁴Yusnani Hasyimzoem, *hukum pemerintahan daerah* (Cet.1; Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 148.

¹⁵Jumadi, *Dasar dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan*, h. 36-37.

- d. Asas dapatnya dilaksanakan;
- e. Asasnya dapat dikenali;
- f. Asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- g. Asas kepastian hukum;
- h. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Apabila mengikut pembagian mengenai adanya asas yang formal dan asas yang material, maka A. Hamid S. Attamimi cenderung untuk membagi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut kedalam:

- 1. Asas-asas formal, dengan perincian:
 - a. Asas tujuan yang jelas;
 - b. Asas perlunya pengaturan;
 - c. Asas organ/lembaga yang tepat;
 - d. Asas materi muatan yang tepat;
 - e. Asas dapatnya dilaksanakan; dan
 - f. Asas dapatnya dikenali;
- 2. Asas-asas material, dengan perincian:
 - a. Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental Negara;
 - b. Asas sesuai dengan hukum dasar Negara;
 - c. Asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasarkan atas hukum; dan
 - d. Asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar system konstitusi

Asas pembentukan peraturan Perundang-undangan yang baik dirumuskan juga dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 5 dan Pasal 6 yang dirumuskan sebagai berikut:¹⁶

Pasal 5 undang-undang di atas menegaskan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

1. Asas kejelasan tujuan; dalam penjelasan Pasal 5 Huruf a di atas memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; dalam penjelasan Pasal 5 Huruf b diatas memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan asas “kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Perundang-undang yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan; dalam penjelasan Pasal 5 Huruf c diatas memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan ”asas kesesuaian antara

¹⁶Jumadi, *Dasar dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan*, h. 38.

jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

4. Asas dapat dilaksanakan; dalam penjelasan Pasal 5 Huruf d diatas memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan ” asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofi, sosiologis maupun yuridis.
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; dalam penjelasan Pasal 5 Huruf e diatas memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan asas “ kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundangan-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermamfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. Asas kejelasan rumusan; dalam penjelasan Pasal 5 Huruf f diatas memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan asas “ kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundangan-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
7. Asas keterbukaan: dalam penjelasan Pasal 5 Huruf g diatas memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undang mulai dari perencanaan, persiapan,

penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Sementara itu, asas-asas yang dikandung dalam materi muatan Peraturan Perundang-undangan dirumuskan dalam Pasal 6 UU. No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di dalam Pasal 6 ayat 1 menegaskan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas.¹⁷

1. Asas pengayoman; Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
2. Asas kemanusiaan; Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf b menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3. Asas kebangsaan; Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf c menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁷Yusnani Hasyimzoem, *hukum pemerintahan daerah*, h. 151.

4. Asas kekeluargaan; Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf d menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5. Asas kenusantaraan; Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf e menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari system hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
6. Asas bhinneka tunggal ika; Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf f menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khusus yang menyangkut masalah-masalah sensitive dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Asas keadilan; Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf g menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali.
8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf h menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas kesamaan

kedudukan dalam hokum pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Asas ketertiban dan kepastian hukum; Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf i menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf j menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antar kepentingan individu dan masyarakat dan kepentingan bangsa dan Negara.

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai jenis, fungsi dan hierarki peraturan perundang-undangan.¹⁸ Materi muatan yang secara spesifik terkait dengan peraturan daerah, tertuang dalam pasal 14 UU Nomor 12 tahun 2011 yang menyebutkan “Materi Muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

¹⁸Republik Indonesia “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Poin 13.

adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi”. Pasal tersebut memberikan pemahaman bahwa materi muatan peraturan daerah dimaksudkan :

- a. Perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- b. Menampung kondisi daerah;
- c. Penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Muatan peraturan perundang-undangan, tolak ukurnya hanya dapat dikonsepkan secara umum. Semakin tinggi kedudukan suatu peraturan perundang-undangan, semakin abstrak dan mendasar materi muatannya. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah kedudukan suatu peraturan perundang-undangan, semakin rinci dan konkrit pula materi muatannya. Berdasarkan hal tersebut diatas, menurut Bagir Manan, suatu peraturan perundang-undangan yang baik setidaknya didasari pada tiga hal, yakni :

- a. Dasar Yuridis (*juridische gelding*), yakni pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat Peraturan Perundang-undangan. Setiap Peraturan Perundang-Undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak, Peraturan Perundang-undangan itu batal demi hukum (*van rechtswegenietig*). Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. Misalnya, undang-undang dalam arti formal (*wet in formelesin*) dibuat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Setiap undang-undang yang tidak

merupakan produk bersama antara Presiden dan DPR adalah batal demi hukum. Begitu pula Keputusan Menteri, Peraturan Daerah dan sebagainya harus pula menunjukkan kewenangan pembuatnya. Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Ketidak sesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut. Misalnya kalau UUD 1945 atau undang- undang terdahulu menyatakan bahwa sesuatu diatur dengan undang-undang, maka hanya dalam bentuk undang-undang hal itu diatur. Kalau diatur dalam bentuk lain misalnya Keputusan Presiden, maka Keputusan Presiden tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti, peraturan perundang- undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat. Peraturan Daerah dibuat oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. Kalau ada Peraturan Daerah tanpa (mencantumkan) persetujuan DPRD maka batal demi hukum. Dalam undang-undang tentang pengundangan (pengumuman) bahwa setiap undang-undang harus diundangkan dalam Lembaran Negara sebagai satu-satunya cara untuk mempunyai kekuatan mengikat. Selama pengundangan belum dilakukan, maka undang-undang tersebut belum mengikat. Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang

bertentangan dengan UUD. Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih bawah.

- b. Dasar Sosiologis (*sociologische gelding*), yakni mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Contoh dalam satu masyarakat industri, hukumnya harus sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat industri tersebut. Kenyataan itu dapat berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi seperti masalah perburuhan, hubungan majikan-buruh, dan lain sebagainya.
- c. Dasar Filosofis, bahwa setiap masyarakat selalu mempunyai cita hukum (*rechtsidee*), yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. *Rechtsidee* tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya. Semuanya ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakekat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat, sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Tetapi ada kalanya sistem nilai tersebut telah terangkum secara sistematis dalam satu rangkuman

baik berupa teori-teori filsafat maupun dalam doktrin-doktrin filsafat resmi seperti Pancasila. Dengan demikian, setiap pembentukan hukum atau Peraturan Perundang-undangan sudah semestinya memperhatikan sungguh-sungguh *rechtsidee* yang terkandung dalam Pancasila.¹⁹

Dengan demikian, dalam pelaksanaan pembuatan peraturan daerah serta muatan materi harus sesuai dengan asas yang telah ditentukan.

B. Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata Bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwet-geving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat perda-perda), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W. van Der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).²⁰

¹⁹Muhammad Irham Raihan, “analisis peraturan daerah bernuansa syariah dalam tatanan hukum Indonesia”, *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Hukum universitas islam negara, 2016), h. 13.

²⁰M. Laica Marzuki, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum* (Cet. II, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 161.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²¹

Dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah yaitu memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara professional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun maksud dan tujuan otonomi daerah sebagai salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan, pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa secara keseluruhan, melalui pemberian, pelimpahan dan penyerahann sebagian tugas atau wewenang oleh pusat ke daerah diharapkan upaya pemerintah mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, adil dan makmur mudah terealisasi.

2. Pembagian Urusan Pemerintahan Pusat Dan Daerah

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat beberapa urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dikenal dengan istilah urusan

²¹Republik Indonesia , "*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*",Pasal 1 butir 6.

pemerintah absolut dan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terbagi dalam beberapa urusan, urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antar pusat, daerah Provinsi, dan daerah Kabupaten/Kota.

Adapun yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu:

- 1) Pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara merupakan kewenangan mutlak dari pemerintahan pusat dengan mendirikan dan membangun angkatan bersenjata, menyatakan perang dan damai, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan system pertahanan dan keamanan, menetapkan kewajiban wajib militer, bela negara untuk setiap warga negara, dan sebagainya.
- 2) Bidang hukum dan peradilan. Mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga kemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan remisi dan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan peraturan lain yang berskala nasional.
- 3) Politik luar negeri. Mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri.

- 4) Kepercayaan/Keagamaan. Menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, dan sebagainya, serta bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah.
- 5) Moneter. Misalnya mencetak uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang, dan sebagainya.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pemerintahan pilihan, urusan pemerintahan wajib dibagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

Kewenangan daerah dalam pemerintahan dapat dibedakan dalam:

1. Urusan pemerintahan wajib artinya suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti pendidikan dasar, kesehatan, kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan, dan lain-lain.
2. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.
3. Urusan pemerintahan umum.²²

²²Khairul Ikhwani Dkk, *otonomi daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), h. 116.

Selain urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya sudah menjadi kewenangan pusat, urusan konkuren yang menjadi kewenangan daerah pun pada akhirnya harus mengalami reduksi dari segi kebebasan berotonomi. Hal ini disebabkan pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk membuat pengaturan dalam bentuk norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang dijadikan acuan bagi pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.²³

3. Pemerintahan Daerah dengan Sistem Otonomi

Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan, antar lain pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan lembaga-lembaga pemerintah, yaitu Kepada Daerah, DPRD dan birokrasi setempat. Sedangkan yang terpisah dari lembaga-lembaga pemerintahan tersebut, direkrut secara demokrasi dan berfungsi menurut mekanisme demokrasi. Dalam undang-undang secara tegas dinyatakan pemerintah daerah yang terdiri atas Kepala Daerah beserta pengkat daerah lainnya sebagai badan legislatif daerah. DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintahan dan

²³ Abdul Rauf Alauddin Said, *Pembagian kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluasnya Menurut UUD 1945*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 4, h. 93.

pembangunan adalah suatu proses yang berlangsung secara berbeda-beda sesuai dengan tersedianya sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Otonomi daerah sebagai kesatuan masyarakat hukum punya wewenang mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, desentralisasi sebenarnya menjelma menjadi otonomi masyarakat setempat memecahkan berbagai masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokal demi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.²⁴

Sesuai dengan kemajemukan masyarakat dan perbedaan kondisi dan potensi antar daerah yang ada, maka terdapat variasi fungsi yang diemban oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sepanjang bersifat lokalitas, undang-undang mewajibkan diselenggarakan fungsi-fungsi dalam bingkai sebelas bidang sesuai dengan pasal 11 ayat 2. Bidang pemerintahan wajib dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi dan tenaga kerja.

Kewenangan daerah tersebut di atas termasuk dalam pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, dan agama. Seluruh ragam dan fungsi yang dimiliki daerah otonom khususnya

²⁴Khairul Ikhwani Dkk, *otonomi daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*, h. 114.

Kabupaten dan Kota akan efektif bila ditunjang dengan kondisi keuangan, sumber daya alam dan manusia, serta kondisi lingkungan yang kondusif.

C. Telaah Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyah)

Secara etimologi siyasah Syar'iyah berasal dari kata Syara'a yang berarti sesuatu yang bersifat Syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.²⁵

Dari definisi siyasah yang dikemukakan Ibnu 'Aqail di atas mengandung beberapa pengertian. Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan siyasah itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa siyasah itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. Kedua, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari siyasah yang penuh cabang dan pilihan. Ketiga, siyasah itu dalam wilayah ijthadi, Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah ijthadi maka dalam siyasah

²⁵Wahbah zuhaily."Ushul Fiqh".kuliyyat da'wah al Islami (Jakarta :Radar Jaya Pratama,1997).h. 89.

yang sering digunakan adalah pendekatan qiyas dan maslahat mursalah. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya siyasah Syar'iyah adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam alQur'an dan Sunnah secara eksplisit.

Adapun Siyasah Syar'iyah dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.²⁶

Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ilmu siyasah syar'iyah (ilmu fiqh siyasah) adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan islam semisal (bagaimana mengadakan) perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam, kendatipun mengenai penataan semua persoalan itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya.²⁷

Istilah siyasah syar'iyah ditinjau dari sumber pembentukannya, dalam literature fiqh siyasah sesungguhnya dikenal dua jenis siyasah, pertama, siyasah syar'iyah yaitu siyasah yang dalam proses penyusunan yang sangat memperhatikan norma dan etika agama. Kedua, siyasah wadh'iyah yaitu siyasah yang hasilnya oleh

²⁶A.Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, edisi revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h.29.

²⁷Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (t,t: Erlangga, 2008), h.10-11.

proses berfikir manusia atau produk pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya tidak melihat norma dan etika agama.

Nilai dan norma merupakan dasar dari pembentukan peraturan yang dibuat oleh institusi-institusi kenegaraan yang mempunyai berwenang syariat adalah sumber pokok bagi kebijakan pemerintah dalam mengatur berbagai macam urusan umum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sumber lainnya manusia sendiri dan lingkungannya. Peraturan-peraturan yang bersumber dari lingkungan manusia itu sendiri seperti pandangan para ahli, hukum adat, pengalaman manusia, dan warisan budaya, perlu dikaitkan agar tidak ada yang bertentangan dengan kehendak dari Tuhan seperti ditetapkan dalam syari'at-Nya. Jadi sumber dari siyasah syar'iyyah ada dua macam yaitu sumber dari atas yakni wahyu (agama) dan sumber dari bawah yaitu manusia sendiri serta lingkungannya.²⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya siyasah syar'iyyah merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika atau menebarkan keamanan dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nas, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit).

Tujuan utama siyasah syar'iyyah adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang islami dan untuk menjelaskan bahwa islam menghendaki terciptanya

²⁸Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, h. 11-12.

suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia disegala zaman dan setiap negara.

Dengan siyasah Syar'iyah, pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan disegala bidang yang mengandung kemaslahatan umat. Baik itu di bidang politik, ekonomi, hukum dan Undang-Undang. Secara terperinci Imam al Mawardi menyebutkan diantara yang termasuk kedalam Ahkamus Sulthaniyah (hukum kekuasaan) atau kewenangan siyasah Syar'iyah meliputi:²⁹

- a. *'Aqdul Imamah* atau kahasusan dan tata cara kepemimpinan dalam Islam yang mengacu kepada syura.
- b. *Taqlidu al-Wizarah* atau pengangkatan pejabat menteri yang mengandung dua pola. Yaitu wizarah *tafwidhiyyah* dan *wizarah tanfidziyyah*.
- c. *Taqlid al-imârah 'ala al- bilâd*, pengangkatan pejabat negara seperti gubernur, wali negeri, atau kepala daerah dan sebagainya.
- d. *Wilayah 'ala hurûbi al- mashâlih*, yaitu kewenangan untuk memerangi para pemberontak atau ahl al- riddah.
- e. *Wilayatu al-qadha*, kewenangan dalam menetapkan para pemimpin pengadilan, para qadhi, hakim dan sebagainya.
- f. *Wilayah 'ala al-hajj*, kewenangan dan tanggungjawab dalam pelayanan penyelenggaraan keberangkatan haji dan dalam memimpin pelaksanaannya.

²⁹Jurnal Bab II *Tinjauan Umum Tentang Siyasah Syar'iyah*, h. 25-27.

- g. *Wilayah 'ala al-shadaqat*, kewenangan mengelola pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqat masyarakat dari mulai penugasan 'amilin, pengumpulan sampai distribusi dan penentuan para mustahiknya.
- h. *Wilayah 'ala al-fai wal gahnimah*, kewenangan pengelolaan dan pendistribusian rampasan perang.
- i. *Wilayah 'ala al-wadh'I al-jizyah wal kharaj*, kewenangan menetapkan pungutan pajak jiwa dari kaum kafir dan bea cukai dari barang-barang komoditi.
- j. *Wilayah fi ahkami al- jarâim*, kewenangan dalam menetapkan hukuman hudu dan ta'zir bagi para pelaku kemaksiatan, tindakan pelanggaran dan kejahatan seperti peminum khamer, pejudi, pezina, pencuri, penganiyaan dan pembunuhan.
- k. *Wilayah fi ahkami al-hisbah*, kewenangan dalam menetapkan lembaga pengawasan, dan lain-lain.

Di dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Diantaranya ayat-ayat tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi dan tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan kemasyarakatan, seperti

prinsip-prinsip musyawarah, konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, dan kebebasan beragama.³⁰

Adapun ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara yaitu:

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa/4 ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا - ٥٨

Terjemahnya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.³¹

An- Nisa/4 ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah

³⁰H. Munawir Sjadzali, *Islam dan tata negara: ajaran, sejarah dan pemikiran*, Edisi 5 (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1993), h. 4.

³¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Cet. IV ;Yogyakarta: Ma'had Nabaawwi, 2013), h. 87.

kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.³²

Kedua ayat tersebut memberikan gambaran landasan kehidupan masyarakat muslim yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemimpin dan rakyat. Dalam surah An-Nisa/4 ayat 58 menjelaskan kewajiban dan kewenangan pemimpin adalah menunaikan amanat dan menegakkan hukum yang adil. Sedangkan surah An-Nisa/4 ayat 58 menjelaskan kewajiban rakyat taat terhadap Allah SWT dan Rasulullah SAW serta Ulil Amri atau pemegang kekuasaan.

³²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 87.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang baik, maka sebagaimana lazimnya, dikemukakan metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

A. Jenis dan lokasi penelitian

1. Jenis penelitian

Berdasarkan lokasi penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah Kualitatif lapangan (*feed kualitatif reseach*). Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivisme.³³ Data diperoleh langsung dari sumber pertama melalui pengamatan atau obesrvasi dan wawancara.

Dalam penelitian ini dimaksud untuk memperoleh pengetahuan tentang “Peraturan Daerah Bernuansa syariah di Kabupaten Bone Telaah Atas Hukum Tatanegara Islam”.

2. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Bone yang merupakan kampung halaman penulis. Sehingga memungkinkan mudah memperoleh data-data

³³Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet.1; Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 85.

yang diperlukan dalam memecahkan permasalahan sebagaimana judul yang diangkat penulis yaitu peraturan daerah bernuansa syariah di Kabupaten Bone (Telaah Atas Hukum Tatanegara Islam).

B. Pendekatan penelitian

1. Pendekatan Yuridis,

Pendekatan yuridis dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu dan permasalahan hukum-hukum yang sedang ditangani, yakni mengenai peraturan daerah bernuansa syariah(syariah) di Kabupaten Bone.

2. Pendekatan sosiologis,

Pendekatan sosiologis/sosial dilakukan untuk mengetahui konsep hukum yang diterap kan di masyarakat, pendekatan ini dipakai pada saat mengkaji apakah sudah relefan dengan keadaan sosial budaya Kabupaten Bone³⁴

3. Pendekatan Normatif Syar'I,

Pendekatan normatif syar'I digunakan untuk menelaah masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu itu sesuai atau tidak dengan ketentuan yang berdasarkan pada hukum Islam dengan melihat apa yang ada dalam teks-teks al-Qur'an dan hadis serta pendapat para ulama.

³⁴Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebuah Pengantar* (Jakarta: CV Rajawali 1982), h. 37.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer digunakan peneliti untuk menemukan fakta-fakta yang ada dilapangan dengan cara interview, yakni kegiatan langsung kelapangan dengan mengadakan wawancara dan Tanya jawab langsung kepada *Responden*.

Adapun informan yang akan peneliti wawancarai ialah:

- a. Kepala bagian hukum pemerintah daerah Kabupaten Bone
- b. Kepala bagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Bone
- c. Anggota DPRD Kabupaten Bone
- d. Pengelola Baznas Kabupaten Bone
- e. Tokoh Masyarakat
- f. Masyarakat
- a. Data Sekunder, digunakan peneliti untuk menjadi sumber data perbandingan dan acuan dalam pembahasan lebih lanjut. Yang dapat berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Wawancara

Peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi dari responden, teknik ini digunakan untuk menemukan data tentang permasalahan secara terbuka dimana pihak informan di minta untuk memberi data yang sebenarnya kemudian peneliti mendengarkan atau mencatat yang disampaikan atau dikemukakan oleh informan.³⁵

2. Observasi

Observasi digunakan peneliti guna mendapatkan sebuah kesimpulan tentang objek yang diamati dengan cara terjun kelapangan untuk mengamati dan mencatat, menganalisis terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.³⁶

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi penelitian digunakan untuk mendapatkan data berupa dokumen yang berfungsi untuk melengkapi data penelitian penulis.

E. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian digunakan peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian. Instruemen sebagai alat pada waktu penelitian yang menggunakan suatu metode:

1. Pedoman wawancara

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 33.

³⁶Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 105.

Pedoman wawancara ini digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan agar dalam proses wawancara bisa terarah dan tidak terjadi kekeliruan.

2. Buku catatan dan alat tulis

Agar data yang diperoleh dapat dibaca kembali, maka membutuhkan buku catatan. Alat ini digunakan untuk mencatat semua percakapan yang diperoleh dari sumber data.

3. Kamera

Alat yang digunakan untuk memotret peneliti dalam melakukan wawancara terhadap informan. Serta digunakan untuk mengambil gambar koleksi dokumen yang sudah ada baik dokumen yang terdahulu maupun dokumen terbaru.

4. Tape recorder

Alat ini digunakan untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan dengan informan. Karena jangan sampai data yang dicatat itu kurang akurat sehingga hasil rekaman dapat digunakan untuk menyempurnakannya.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Klasifikasi data digunakan untuk menggolongkan atau mengelompokkan data yang dihasilkan dalam penelitian. Metode ini bertujuan untuk menyusun sebuah data secara sistematis atau menurut aturan maupun kaidah yang telah ditetapkan.
- b. Reduksi data, dalam proses reduksi data dilakukan seleksi untuk memilih data yang relevan dan bermakna yang mengarah pada pemecahan masalah terhadap data. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami hasil penelitian.
- c. Koding dilakukan untuk memberikan kode yang spesifik pada respon jawaban responden untuk memudahkan proses pencatatan data.
- d. Editing Data dilakukan untuk memperbaiki data menghilangkan keraguan-keraguan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara. Proses ini bertujuan untuk mengetahui relevansi atau hubungan dan keabsahan data yang dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan

2. Analisis Data

Analisis data memiliki kegunaan dalam penelitian sebagai metode untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif terhadap data sekunder dan data primer, yaitu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum.

G. Pengujian Keabsahan data

Suatu peneliti diorientasikan pada derajat keilmuan data penelitian maka suatu penelitian dituntut agar bisa memenuhi standar penelitian sampai dapat memperoleh

kesimpulan yang objektif, artinya bahwa suatu penelitian bila telah memenuhi standar objektivitas maka penelitian tersebut dianggap telah teruji keabsahan data penelitiannya.

Dalam menguji suatu keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil penelitian, peneliti dituntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian, pengamatan yang cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi digunakan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Secara geografis, wilayah Kabupaten Bone terletak di bagian Timur Provinsi Sulawesi Selatan dan terletak dibagian Barat Teluk Bone. Secara astronomis Kabupaten Bone terletak 04°13' sampai 05°06' Lintang Selatan(LS) dan 119°42' sampai 120°40' Bujur Timur (BT)³⁷, yang berada di pantai Timur Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Soppeng;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Gowa;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep, dan Barru.

Luas wilayah Kabupaten Bone sekitar 4.559 km² atau 9,78 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administrasi pemerintahan wilayah Kabupaten Bone terbagi menjadi 27 kecamatan, yang terdiri dari 333 desa dan 39 kelurahan.³⁸

³⁷ Sumber : Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Bone dalam angka Tahun 2019*,h.3.

³⁸ Sumber: Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Bone dalam angka Tahun 2019*,h.4.

Table 1

Luas Kabupaten Bone berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase
1.	Bontocani	463,35	10.16
2.	Kahu	189,50	4.16
3.	Kajuara	124,13	2.72
4.	Salomekko	84,91	1.86
5.	Tonra	200,32	4.39
6.	Patimpeng	130,47	2.86
7.	Libureng	344,25	7.55
8.	Mare	263,50	5.78
9.	Sibulue	155,80	3.42
10.	Cina	147,50	3.24
11.	Barebbo	114,20	2.50
12.	Ponre	293,00	6.43
13.	Lappariaja	138,00	3.03
14.	Lamuru	208,00	4.56
15.	Tellu Limpoe	318,10	6.98
16.	Bengo	164,00	3.60
17.	Ulaweng	161,67	3.55
18.	Palakka	115,32	3.55

19.	Awangpone	110,70	2.43
20.	Tellu Siattinge	159,30	3.49
21.	Amali	199,13	2.61
22.	Ajangale	139,00	3.18
23.	Dua Boccoe	144,90	3.18
24.	Cenrana	143,60	3.15
25.	Tanete Riattang Barat	53,68	1.18
26.	Tanete Riattang	23,79	0,52
27.	Tanete Riattang Timur	48,88	1.07
Jumlah		4.559,00	100

Sumber : Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Bone dalam Angka Tahun 2019*

2. Keadaan Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Bone berdasarkan agregat Kabupaten Bone sampai juni tahun 2019 sebanyak 806.889 jiwa yang terdiri atas 394.477 jiwa penduduk laki-laki dan 412.412 jiwa penduduk perempuan.³⁹ Jumlah penduduk Kabupaten Bone terdistribusi pada 27 kecamatan dengan tingkat persebaran tidak merata pada setiap kecamatan.

3. Keadaan Topografi

Wilayah Kabupaten Bone terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan daerah perbukitan dengan variasi ketinggian dari permukaan laut 0 meter hingga lebih dari

³⁹Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone dalam Angka Tahun 2019.

1.000 meter. Kondisi permukaan lahan bervariasi mulai dari landai, bergelombang hingga curam.

4. Kondisi Pendidikan, Kesehatan, dan Agama

a. Pendidikan

Menurut Dinas Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama Kabupaten Bone, pada tahun 2018 terdapat 491 TK, 669 Sekolah Dasar, 81 Madrasah Ibtidaiyah, 123 SMP, 86 Madrasah Tsanawiyah, 36 SMA, 22 SMK, dan 38 Madrasah Aliyah.⁴⁰

b. Kesehatan

Pada tahun 2019 terdapat 4 Rumah Sakit di Kabupaten Bone yang terletak di Kecamatan Tanete Riattang Barat dan Tanete Riattang. Kemudian juga terdapat 38 Puskesmas, 980 Posyandu, serta beberapa fasilitas kesehatan lainnya yang tersebar diseluruh kabupaten Bone.⁴¹

c. Agama

Kabupaten Bone mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Berdasarkan data tahun 2019 terdapat sebanyak 1.447 masjid dan sebanyak 1.584 musalla yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan dan desa kabupaten Bone. Selain masjid ada juga 4 gereja, 1 pura dan 1 vihara sebagai wujud toleransi beragama.⁴²

⁴⁰Sumber : Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Bone dalam angka 2019*, h. 36.

⁴¹Sumber : Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Bone dalam angka 2019*, h. 36.

⁴²Sumber : Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Bone dalam angka 2019*, h. 36.

Tabel 2

Jumlah tempat peribatan menurut Kecamatan di Kabupaten Bone Tahun 2018

No.	Kecamatan	Masjid	Mushola	Gereja	Pura	Vihara
1.	Bontocani	49	49	-	-	-
2.	Kahu	103	105	-	-	-
3.	Kajuara	67	67	-	-	-
4.	Salomekko	33	44	-	-	-
5.	Tonra	37	37	-	-	-
6.	Patimpeng	57	64	-	-	-
7.	Libureng	86	86	-	-	-
8.	Mare	55	55	-	-	-
9.	Sibulue	74	74	-	-	-
10.	Cina	46	56	-	-	-
11.	Barebbo	43	56	-	-	-
12.	Ponre	42	44	-	-	-
13.	Lappariaja	51	52	-	-	-
14.	Lamuru	36	42	-	-	-
15.	Tellu Limpoe	71	74	-	-	-
16.	Bengo	41	51	-	-	-
17.	Ulaweng	40	50	-	-	-
18.	Palakka	47	47	-	-	-

19.	Awangpone	53	68	-	-	-
20.	Tellu Siattinge	36	36	-	-	-
21.	Amali	43	43	-	-	-
22.	Ajanggale	41	43	-	-	-
23.	Dua Boccoe	71	76	-	-	-
24.	Cenrana	43	52	-	-	-
25.	Tanete Riattang Barat	60	90	-	1	-
26.	Tanete Riattang	69	70	4	-	1
27.	Tanete Riattang Timur	53	53	-	-	-
Jumlah		1.447	1.584	4	1	1

Sumber: Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Bone dalam angka 2019*

B. Pemberlakuan Peraturan Daerah Bernuansa syariah di Kabupaten Bone

Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dengan adanya pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola daerahnya, yang salah satunya yaitu dapat membuat peraturan daerah (perda) yang disesuaikan dengan tingkatan, kebutuhan dan kondisi khusus daerah masing-masing.

Berdasarkan hal tersebut, banyak pemerintah daerah yang membuat produk hukum dengan melihat kondisi khusus daerahnya, tidak terkecuali Kabupaten Bone yang melihat masyarakatnya mayoritas muslim maka membuat peraturan daerah yang bernuansa syariah Islam (syariah). Dalam hal ini yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat.

Menurut Anwar adanya istilah perda bernuansa syariah dikarenakan materi muatan perda-perda itu bersinggungan dengan pengaturan kehidupan beragama masyarakat muslim sehingga dipersepsikan sebagai perda bernuansa syariah.⁴³

Pertimbangan pemberlakuan peraturan daerah bernuansa syariah di Kabupaten dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat dikarenakan pemerintah menganggap bahwa zakat merupakan salah satu ibadah yang bersifat mutlak bagi setiap orang islam, maka dipandang perlu untuk ditegakkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Bone. Dengan pengelolaan yang baik zakat menjadi sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial masyarakat Kabupaten Bone.

Pengoptimalan zakat sangat relevan dilakukan, mengingat masih banyak penduduk yang tergolong miskin di Kabupaten Bone. Oleh karena itu perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah maupun masyarakat. Dan zakat

⁴³ Anwar (44 Tahun), Kepala Sub Bagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, *Wawancara*, Bone, 11 September 2020.

diharapkan menjadi instrument yang mampu menjadi solusi. Untuk itu, keberadaan peraturan daerah tentang pengelolaan zakat keberadaanya dianggap penting.

Namun dibentuknya aturan yang memasukkan unsur keagamaan kedalam peraturan daerah sering kali dianggap bermasalah apabila dipandang dari segi pembentukannya dimana terdapat tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dimana dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa urusan agama merupakan kewenangan absolut pemerintah pusat.

Dalam menganalisis pemberlakuan syariat islam secara formal dalam konteks otonomi daerah harus dilihat dari perspektif peraturan perundang-undangan. Dalam rangka ini pula, harus mengacu kepada teori hukum berjenjang (hirarki perundang-undangan).

Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat, mengatur bahwa kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang materi muatannya tentang norma-norma agama merupakan kewenangan absolut Pemerintah Pusat, sehingga dapat dipahami bahwa pembentukan perda yang materi muatannya tentang norma-norma agama bukan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Dimana Pasal 18 ayat (5)

UUD Tahun 1945 diatur bahwa pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai urusan pemerintah pusat, termasuk membentuk peraturan perundang-undangan yang materi muatannya tentang norma-norma agama.

Dari ketentuan tersebut jelas bahwa agama menjadi urusan pemerintah pusat. Dengan demikian pemerintah pusatlah yang mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan yang mengatur tentang persoalan agama termasuk syariat islam.

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat jika dilihat dari pembentukannya yang bermuatan syariat (agama) termasuk peraturan daerah yang cacat yuridis (cacat wewenang) dan tidak absah karena pembentukannya tidak didasari pada kewenangan yang dimilikinya. Sebagaimana yang diatur pasal 18 ayat (5) UUD tahun 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) huruf g dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Tetapi menurut Anwar Bahwa pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat sah secara hukum. Menurut beliau, dibentuknya perda zakat karena melihat kondisi masyarakat Kabupaten Bone yang mayoritas islam dan untuk membentuk peraturan daerah yang sesuai dengan keunikan/kondisi daerah dalam bingkai NKRI melalui pasal 29 dan pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan landasan yang kokoh bagi pemerintah daerah sepanjang diperintahkan undang-undang dan tidak bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Dengan adanya jaminan tersebut

memberikan celah yang memungkinkan bagi daerah-daerah untuk memberlakukan corak hukumnya masing-masing. Termasuk pembentukan peraturan yang bersumber dari nilai-nilai Islam. Mengenai pemberlakuan peraturan daerah di Kabupaten Bone yang bersumber dari nilai-nilai islam dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat merupakan respon pemerintah daerah terhadap adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolan Zakat perlu untuk ditinjau lanjuti ditingkat Kabupaten Bone ⁴⁴

Menurut Adriani Alimuddin Page mengatakan bahwa pemerintah sebagai pelindung rakyat memiliki kewajiban untuk melindungi dan memfasilitasi warganya menunaikan ajaran agama sesuai dengan aturan agama. Jadi tidak ada salahnya pemerintah daerah Kabupaten Bone menetapkan suatu peraturan yang mengarahkan masyarakatnya untuk melakukan ibadah, selama perda itu isinya mengajak kepada kebaikan dan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bone itu sah-sah saja. ⁴⁵

Akan tetapi lebih memperkuat pernyataan tersebut maka lahirlah Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat karena memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan

⁴⁴Anwar (44 Tahun), Kepala Sub Bagian Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, *Wawancara*, Bone, 11 September 2020.

⁴⁵Hj. Adriani Alimuddin Page, S.E (45 Tahun), Anggota DPRD Kabupaten Bone, *wawancara*, Bone, 10 September 2020.

masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Adanya kewenangan tersebut memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk mengatur berbagai hal bagi kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi wilayahnya. Sebagai pranata sosial, Hukum islam dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran islam dan dinamika sosial. Hukum selalu bersandingan dengan dinamika sosial kehidupan manusia karena manusia merupakan makhluk sosial.

Terjadinya berbagai pertentangan pandangan terhadap pemberlakuan peraturan daerah bernuansa syariah akibat adanya otonomi yang luas yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengelolah daerahnya dan dalam pasal 29 ayat (1) UUD tahun 1945 yang menegaskan bahwa “*Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa*” yang artinya telah memberikan legitimasi yuridis bagi formalisasi hukum islam untuk terintegrasi secara transformatif dalam sistem politik dan hukum ketatanegaraan Indonesia. Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah memberikan batasan bahwa urusan agama merupakan kewenangan absolut pemerintah pusat. Artinya pemerintah daerah tidak berhak mencampuri urusan yang menyangkut agama tertentu, termasuk membuat peraturan yang berkaitan dengan agama.

Zakat merupakan bagian dari rukun islam, sehingga termasuk dalam urusan agama yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat direspon Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone

Nomor 13 tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat, Hal ini imbas otonomi daerah ditafsirkan pemerintahan daerah dengan kebebasan yang lebih luas termasuk menyusun regulasi daerah namun sebenarnya pemerintah daerah tidak berwenang untuk menetapkan perda zakat apalagi perda zakat hal ini dapat ditelusuri dari kewenangan pemerintah daerah.

Akan tetapi pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat memiliki landasan kuat dalam penetapannya.

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Andi Dedi Astaman Hamsa bahwa melihat masyarakat Kabupaten Bone yang mayoritas agama islam. Pemberlakuan perda zakat ini dianggap penting guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bone. Dan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pengelolaan zakat sehingga terarah dan tepat guna. Adapun dari segi pengimplementasiannya perda bernuansa syariah di Kabupaten Bone secara khusus hanya ditujukan bagi masyarakat yang beragama islam, dan sejauh ini terbukti tidak merugikan kelompok agama lain”.⁴⁶

Dari hasil wawancara diatas, sudah memperkuat alasan mengapa perda zakat di Kabupaten Bone ditetapkan. Disamping itu pembuktian dari pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat, menimbulkan dampak yang sangat positif bagi masyarakat yang membutuhkan perhatian dari pemerintah. Seperti yang telah dialami oleh salah satu warga di Desa

⁴⁶A. Dedi Astaman Hamsah, S.H, M.H (35 Tahun), Kepala Bagian Bantuan Hukum, Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Bone, *Wawancara*, Bone, 07 September 2020.

Ulaweng Riaja, Kecamatan Amali Kabupaten Bone yang mendapatkan bantuan langsung dari program Baznas yaitu bantuan sembako dan bedah rumah.

Menurut penuturan bapak Majid pemerintah bersama Baznas datang kerumah meninjau terlebih dahulu karena rumah saya tidak layak huni dan sudah roboh, mereka pada saat itu sudah membawah sembako dan memberikan bantuan langsung tunai sejumlah uang, saat itu mereka menjanjikan datang kembali dengan membawah bantuan berupa material bangunan untuk membangun rumah untuk saya dan tidak lama kemudian pemerintah bersama baznas benar-benar datang dan akhirnya seperti yang kita liat bersama bahwa rumah yang dibangun oleh baznas telah bisa saya tempati saat ini”⁴⁷

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dengan adanya pemberlakuan pengelolaan zakat terbukti dapat memberikan dampak yang nyata dalam masyarakat yang dimana membantu mensejahterakan kehidupan masyarakat di Kabupaten Bone.

Pengelolaan zakat Kabupaten Bone yang dipengang penuh oleh Baznas mencetuskan beberapa program, seperti zakat yang disalurkan tidak hanya berbentuk uang saja tetapi banyak modelnya ada seperti pembagian sembako bahkan penyaluran zakat ke korban bencana alam dan ada juga penyaluran seperti program beda rumah.

Pengelolaan zakat di Kabupaten Bone diserahkan sepenuhnya di Baznas baik berkaitan bagaimana menghimpun zakat dari masyarakat dan bagaimana

⁴⁷Majid, (57), masyarakat Desa Ulaweng Riaja Kecamatan Amali Kabupaten Bone penerima bantuan dari Baznas, *Wawancara*, Bone, 08 September 2020.

penyalurannya. Perda tentang zakat yang sangat dibutuhkan sekarang bukan lagi mengenai takaran-takaran zakat tetapi yang kita butuhkan yaitu perda yang berupa instruksi pada masyarakat Kabupaten Bone agar sadar akan kewajiban berzakat jika sudah cukup nisabnya. Potensi zakat di Kabupaten Bone sangat luar biasa. Apabila dimaksimalkan megurangi tingkat kesenjangan yang ada di Kabupaten Bone. Untuk itu perlun adanya peran pemerintah daerah dalam pengelolaan zakat.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa diberlakukannya perda bernuansa syariah di Kabupaten Bone dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat dikarenakan pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bone, terutama untuk menuntaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjataan sosial. untuk itu perlu didukung oleh peraturan yang menjadi payung hukum guna mengoptimalkan pengelolaan zakat. Hal ini juga relevan dengan masyarakat Kabupaten Bone yang mayoritas muslim yang membutuhkan jaminan hak-hak beragama yang bersumber dari nilai-nilai dan norma-norma agama Islam.

Tetapi secara prosedural, pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat termasuk peraturan daerah yang cacat yuridis (cacat wewenang). dan tidak absah karena pembentukannya tidak didasari pada kewenangan yang dimilikinya. Karena dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur: 1) politik luar negari; 2) keamanan; 3) yustisi; 4) moneter dan fiskal nasional; dan 5) agama merupakan kewenangan absolut

pemerintah pusat. Jadi Pemerintah Kabupaten/Kota tidak berwenang membentuk peraturan daerah yang materi muatannya tentang norma-norma agama. Dengan kata lain Pemerintah Kabupaten Bone tidak berwenang membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat.

C. Hambatan atau Kendala dalam Pelaksanaan Perda Bernuansa syariah di Kabupaten Bone

Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan peraturan daerah bernuansa syariah di Kabupaten Bone dalam hal ini Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat, sebagai berikut:

1. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat Melaksanakan Zakat

Lawrence M. Friedman mengatakan bahwa terdapat tiga komponen dalam sistem hukum, yaitu komponen struktur, komponen substansi dan komponen budaya, ketiga komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan.⁴⁸ Adapun salah satu bentuk dari budaya hukum yaitu kesadaran hukum.

Kesadaran hukum sangat erat kaitannya dengan ketaatan hukum, maksudnya suatu produk hukum ditaati karena terbangunnya kesadaran hukum dalam diri individu atau kelompok dalam suatu masyarakat hukum tertentu. Adapun pada masyarakat Kabupaten Bone, ketaatan hukum terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 tahun 2009 tentang Pengelolaan zakat sangat rendah.

⁴⁸Lawrence M. Friedman, *The Legal Sistem : A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), h. 10.

Menurut Lin Pratiwi mengatakan bahwa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perda tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Bone yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang zakat, memang masyarakat di Kabupaten Bone adalah mayoritas islam namun sebagian dari masyarakat yang tidak begitu paham tentang tuntunan agama yang dianutnya, contohnya tentang zakat, sebagian dari masyarakat kurang paham dengan prosedur pembayaran zakat yang benar sesuai dengan syarat islam maupun peraturan yang berlaku. Bahkan sebagian masyarakat mengetahui bahwa perintah zakat itu hanya berupa zakat yang dikeluarkan ketika bulan ramadhan(zakat fitra) saja.⁴⁹

Hasil wawancara dengan beberapa masyarakat di Kabupaten Bone, benar bahwa tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang zakat masih terbilang rendah, menurut penuturan P. Rosi dan Indo Tang bahwa mereka hanya mengeluarkan zakat ketika bulan ramadhan saja dan tidak mengetahui jika terdapat zakat maal (harta) yang dikeluarkan apabila telah memenuhi haul dan nisab, serta zakat-zakat lain. Bahkan juga tidak mengetahui jika terdapat peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaa zakat.⁵⁰

Untuk mengatasi kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam menunaikan zakat, maka pemerintah harus melakukan sosialisasi secara berkala tentang kewajiban menunaikan zakat. Karena salah satu faktor penyebab masyarakat kurang kesadaran

⁴⁹Lin Pratiwi, S.E, (36), Staf Baznas Kabupaten Bone, *Wawancara Online*, Bone 17 September 2020.

⁵⁰P. Rosi (57) dan Indo Tang (60), Masyarakat Kabupaten Bone, *Wawancara*, Bone 15 September 2020.

hukumnya karena ketidaktahuan, maka di sinilah pentingnya sosialisasi. Pemerintah dapat bekerja sama dengan pemuka agama untuk mendakwakan kewajiban menunaikan zakat dan mengadukasi masyarakat tentang pentingnya dan manfaat menyalurkan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya melalui lembaga pemerintah.

2. Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat oleh Pemerintah

Hambatan selanjutnya yang dihadapi dalam pelaksanaan perda bernuansa syariah di Kabupaten Bone (Perda Zakat) yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat. Menurut A. Irham bahwa sebenarnya ia ingin mengeluarkan zakat profesi sebagaimana yang diatur dalam perda zakat di Kabupaten Bone, namun masih ragu dengan pengelola zakat karena kurangnya transparansi dalam pendistribusian zakat.⁵¹

Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat karena kekhawatiran terjadinya korupsi. Hal ini dapat diketahui dari A. Irham yang ragu mengeluarkan zakat melalui lembaga yang disediakan pemerintah karena tidak yakin dengan pendistribusian zakat. Keraguan ini muncul tentunya karena masyarakat sudah sering melihat tindakan korupsi yang dilakukan pemerintah.

Demi menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pengelola zakat maka perlu transparansi dalam pendistribusian zakat. Untuk melakukan hal tersebut sangat mudah di zaman sekarang ini. Karena kemudahan mengakses dan

⁵¹A. Irham (28) Pegawai Negeri Sipil, *Wawancara*, Bone 16 Desember 2020.

menyebarkan informasi akibat dari perkembangan teknologi. Seharusnya pengelola zakat memanfaatkan hal ini. Misalnya melalui media-media informasi dipublikasikan tentang pendistribusian zakat yang dapat diakses semua orang dan yang hanya dapat diakses oleh wajib zakat yang telah menunaikan kewajibannya sehingga mereka benar-benar mengetahui pendistribusian zakat tersebut, yang tentunya menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pengelola zakat.

3. Lemahnya Sanksi Terhadap Wajib Zakat

Lemahnya sanksi terhadap muzakki (wajib zakat) juga menjadi hambatan dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Bone. Dalam Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat, diatur bahwa wajib zakat yang lalai, tidak melakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 6 dikenakan biaya administrasi hanya dengan jumlah sepuluh persen (10%) dari kadar zakat yang menjadi kewajibannya.

Padahal sanksi sangat berperan besar terhadap ketaatan hukum. Menurut H.C. Kelaman dan L. Pospisil bahwa salah satu sebab terwujudnya kepatuhan hukum karena ada sanksi yang dikenakan jika melanggar hukum.⁵² Tetapi jika sanksi yang ada tidak menyebabkan keinginan menghindarkan diri dari sanksi tersebut dan tetap melakukan pelanggaran hukum karena menganggap sanksi tersebut tidak berakibat berarti baginya, maka sanksi tersebut kurang efektif. Seperti halnya pada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat.

⁵²Ahmad Saudi, Sosiologi Hukum: *Penegakan Realitas dan Nilai Moralitas Hukum* (Jakarta: Kencana), h.193.

Tentu saja sanksi sepuluh persen dari kadar harta yang wajib dikeluarkan zakatnya terlalu rendah. Misalnya untuk zakat fitra, harta yang wajib dikeluarkan yaitu senilai Rp. 30.000 dalam setahun, sehingga denda yang perlu dibayarkan apabila lalai dalam membayar zakat fitra hanya Rp. 3000. Adapun untuk zakat harta, misalnya zakat profesi, harta yang wajib dikeluarkan yaitu 2,5% dari gaji yang diperoleh, jika gaji yang diperoleh dalam sebulan Rp. 1000.000 maka harta yang wajib dikeluarkan yaitu senilai Rp. 25.000, sehingga denda yang perlu dibayarkan apabila lalai dalam membayar zakat fitra hanya Rp. 2500. Seharusnya sanksi yang ada cukup besar, agar supaya muncul kesadaran menunaikan zakat. Misalnya sepuluh kali lipat dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Walaupun bersifat memaksa, tetapi begitulah cara kerja hukum.

D. Telaah Atas Hukum Tata Negara Islam Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa syariah di Kabupaten Bone

Hukum tata negara islam atau siyasah syar'iyah merupakan sebuah doktrin hukum islam yang memberi kekuasaan kepada penguasa atau pemerintah untuk menentukan bagaimana syariah diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pemerintah dalam menegakkan syariah di zaman sekarang dapat memberlakukan kebijakan yang pernah diberlakukan oleh pemerintahan islam masa

lalu, dengan melihat situasi dan kondisi perkembangan zaman. Dalam penerapan syariah harus adil.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Terjemahnya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”⁵³

Melalui syariat islam, Allah SWT membebani manusia kewajiban mengaktualisasikan kodrat mereka sebagai hamba Allah SWT dan kewajiban tersebut, dia memberi mereka kekuasaan sebagai hak-hak asasi dan hak-hak politik untuk mendayagunakan potensi alam dan mengatur kehidupan mereka. Pada sisi lain dia juga mewajibkan pemerintah agar menegakkan hukum Allah SWT untuk mengatur kehidupan masyarakat. Untuk itu dia memberi kekuasaan kepada mereka.⁵⁴

Kewenangan yang diberikan Allah SWT kepada pemerintah melalui al-Quran tidak hanya terbatas pada penerapan hukum-hukum Allah, tetapi juga kewenangan menemukan aturan-aturan hukum berkenaan dengan hal-hal yang tidak diatur syariat secara tegas dan rinci atau sama sekali didiamkan untuk diatur oleh manusia

⁵³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 87.

⁵⁴Arlis, “*Siyasah Syar'iyah Tentang Pengelolaan Zakat Pada Masa Awal Islam*”, *Juris* 10, no 3 (2011), h. 175.

sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran syariat. Oleh karena itu, dalam menetapkan suatu hukum terdapat beberapa landasan yaitu al-Quran, sunnah, ijma atau kesepakatan para ulama serta qiyas.

Dalam islam, pemimpin suatu kaum adalah pelayan dari kaum tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

“Pemimpin suatu kaum adalah pengabdian (pelayan) mereka”.

Pemimpin atau pemerintah yang menjadi pelayan dari kaumnya itu dalam ilmu politik merupakan pelayan masyarakat. Oleh karena itu pemimpin atau pemerintah harus aktif dalam memberikan pelayanan dalam segala aspek kehidupan masyarakatnya, seperti masalah keamanan, ekonomi, kemajuan pendidikan, dan segala hak dan kewajibannya.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bone dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya yang mayoritas islam mengeluarkan suatu kebijakan yang berasal dari nilai-nilai islam yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 tahun 2009 tentang Pengelolaan zakat. Pembentukan perda ini sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat di Kabupaten Bone.

Khusus persoalan zakat, terlihat sangat banyak riwayat yang disebutkan dalam berbagai kitab hadis. Bahkan, dalam al-Qur'an sendiri dalam beberapa ayatnya, perintah zakat bergandengan dengan perintah shalat. Hal ini menunjukkan arti

penting zakat sebagai salah satu ajaran Islam. Ini pulalah yang digiatkan oleh Nabi kepada umat Islam.

Pengelolaan zakat merupakan wewenang negara yang telah diatur oleh undang-undang sebagaimana yang harus dikelola oleh pemerintah yang sah menurut islam. Landasan pemikiran terhadap hal ini adalah firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - ١٠٣

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dengan sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sungguh doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi maha mengetahui.”⁵⁵

Ayat di atas menjelaskan hak negara untuk memungut zakat. Tuntutan dalam ayat tersebut bersifat umum untuk semua orang yang memimpin urusan umat islam. Usman Husein Abdullah menyatakan bahwa pemerintah harus memelihara hukum-hukumnya dan bertanggung jawab terhadap pengeluaran zakat, pengelolaan, serta penggunaannya.⁵⁶

Adapun yang berhak menerima zakat sebagaimana yang dijelaskan dalam QS At Taubah ayat 60 :

⁵⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 203.

⁵⁶Arlis, “*Siyasah Syar'iyah Tentang Pengelolaan Zakat Pada Masa Awal Islam*”, *Juris* , 10 no 3 (2011): h. 175.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ - ٦٠

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.⁵⁷

Kesepakatan para ulama menyimpulkan bahwa keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan zakat merupakan suatu kewajiban ketatanegaraan. Yusuf Kadarawi mengemukakan sebagaimana dikutip oleh Amran Swadi dan Mardi Chandra sebab kewajiban pemerintah untuk mengelola zakat antara lain:

- a. Jaminan terlaksananya syariat karena banyak yang mangkir jika tidak diawasi.
- b. Untuk terwujudnya jaminan pemerataan.
- c. Untuk memelihara para mustahiqin zakat
- d. Sektor zakat tidak terbatas pada individu akan tetapi juga berlaku umum dan universal sehingga sector ini akan berkembang dan bermanfaat jika ditangani oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan.

Pemerintah dapat melihat meneladani sejarah pelaksanaan zakat dimasa Rasulullah saw. Dimana zakat benar-benar diarahkan untuk kesejahteraan umat. Sebagaimana Rasulullah mengutus Muadz bin Jabal menjadi qadhi di Yaman, Rasulullah memberikan taushiyah dan wejangan agar menyampaikan kepada ahli

⁵⁷ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 196.

kitab beberapa hal termasuk menyampaikan kewajiban zakat kepada mereka. Nabi berkata :

ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ۝

Terjemahannya:

“Serulah mereka untuk mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku adalah utusan Allah, jika mereka mentaatinya maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas nama harta mereka yang diambil oleh orang kaya diberikan kepada kelompok yang fakir.” (HR Bukhari, no 1395 dan Muslim, no.19)⁵⁸

Berdasarkan hadist tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kesuksesan pengelolaan zakat, dan pemerintah dengan kewenangannya dapat menjadi kekuatan penekan.

Dengan demikian telaah siyasah syariyyah terhadap adanya aturan tentang pengelolaan zakat, membenarkan adanya intervensi dan peran pemerintah untuk mengelolah dengan tujuan mensejahterakan dan melindungi terhadap kepentingan publik

Untuk itu sangat penting mendapat perhatian dari pemerintah dan khususnya di daerah karena seperti yang kita tahu bersama bahwa terlalu luasnya masing-masing wilayah sehingga badan zakat yang sudah di amanahkan oleh pemerintah belum

⁵⁸ <https://www.madaninews.id/8001/muslim-wajib-tau-ini-ketentuan-zakat-mal-yang-harus-dikeluarkan.html> diakses pada tanggal 21 desember 2010.

mampu menjangkau seluruhnya maka dari itu untuk lebih efektif masih dibutuhkan payung hukum dalam mengatur pengelolaan zakat daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemberlakuan Peraturan Daerah bernuansa syariah di Kabupaten Bone dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat, merupakan bentuk respon pemerintah Kabupaten Bone terhadap adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, yang menganggap bahwa undang-undang tersebut belum efektif dan memerlukan peraturan pelaksanaan lebih lanjut di tingkat Kabupaten Bone, diberlakukanya aturan tersebut guna menjadi payung hukum dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Bone sehingga pengelolaan zakat lebih optimal dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama untuk menuntaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial. Hal ini juga relevan dengan masyarakat Kabupaten Bone yang mayoritas muslim yang membutuhkan jaminan hak-hak beragama yang bersumber dari nilai-nilai dan norma-norma agama islam. Namun jika dilihat dari segi pembentukan perda bernuansa syariah yang ada di Kabupaten Bone dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat yang memasukkan unsur keagamaan kedalam peraturan daerah sering kali dianggap bermasalah apabila dipandang dari segi pembentukannya dimana terdapat

tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

2. Hambatan atau kendala pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pengelolaan zakat oleh pemerintah dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat oleh pemerintah serta lemahnya sanksi terhadap wajib zakat.
3. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Bone sejalan dengan hukum tatanegara islam dimana pemimpin atau penguasa sebagai khalifa Allah swt diperintahkan untuk menegakkan hukum Allah untuk mengatur
4. kehidupan masyarakat. Dengan adanya aturan yang dikeluarkan pemerintah untuk pengelolaan zakat, membenarkan adanya intervensi dan peran pemerintah untuk mengelolah dengan tujuan mensejahterakan dan melindungi terhadap kepentingan publik.

B. Implikasi

1. Pemerintah daerah khususnya pemda Kabupaten Bone dituntut tentang prinsip-prinsip pembentukan perda agar tidak terjadi peraturan yang tumpang tindih atau saling bertentangan dengan peraturan lainnya. Dan peraturan yang dibentuk betul-betul aspirasi masyarakat. Selama aspirasi tersebut sejalan dengan kaidahyang berlaku maka laksanakan, dan jika tidak maka taati kaidah hukum yang berlaku.

2. Peningkatan ketaatan menunaikan zakat dapat dilakukan dengan sosialisasi secara berskala tentang kewajiban menunaikan zakat serta mamfaat dan pentingnya menyalurkan melalui lembaga yang disediakan oleh pemerintah sehingga terwujud kesadaran menunaikan zakat, ditambah transparansi pendistribusian zakat sehingga timbul kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat.
3. Islam dan setiap muslim yang taat terhadap agama islam menghendaki agar hukum islam dapat dilaksanakan secara menyeluruh dalam sendi kehidupan. Terhadap beberapa aturan hukum islam yang implementasiannya membutuhkan kehadiran pemerintah. Sehingga pemerintah berperan penting dalam menjalankan hukum islam. Tetapi hukum Indonesia masih terbilang kurang dari jumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang norma-norma agama serta minimnya kewenangan-kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang materi muatannya mengatur tentang norma-norma agama. Kurangnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang norma-norma agama seharusnya menjadi dorongan bagi umat muslim Indonesia untuk ikut serta dalam pembentukan peraturan perundang-undngan secara aktif sebagai wakil umat muslim dipemerintahan sehingga dapat dibentuk aturan hukum yang dapat menjawab kebutuhan hukum umat islam Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Amrullah, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1996.
- Asshiddiqie ,Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers,2011.
- Damanik,Khairul Ikhwan, Dkk, *otonomi daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*. cet. Ke 3, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet.1; Jakarta; Bumi Aksara, 2013.
- Hasyimzoem, Yusnani, *hukum pemerintahan daerah*. Cet.1; Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- <http://www.djpp.depkmham.go.id>. (27 Januari 2020).
- Huda, Ni'Matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Ed. Revisi, Cet. 11; Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Jumadi. *Dasar dan Teknik Pembentukan Perundang-Undangan* . Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Kartasapoetra, dan Misdianti. *Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*. Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara,1993.
- Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Cet.IV; Yogyakarta: Ma'had Nabawwi, 2013.
- Marzuki, M. Laica, *Berjalan-Jalan di Ranah Hukum*. Buku 1, Edisi Revisi Cet. II, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Muntoha, *Otonomi Daerah dan Perkembangan "Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah"*. Cet.I ; Yogyakarta: Safiria Insiania Press, 2010.

Mustafa, Bachan, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Na'imah, Hayatun. *Perda Berbasis Syariah Dan Hubungan Negara-Agama Dalam Perspektif Pancasila*. <http://dx.doi.org/10.21093/mj.v15i2.623>. (13 November 2019).

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat.

Rahardjo, Mudjia. *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*, situs resmi uin Malang. <http://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>. (09 Desember 2019)

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Teknis Pengeelolaan Zakat*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat*.

Rianto, Reinaldo dan Ummu Salamah. *Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah*. <https://www.academia.edu/30583307>. (13 November 2019).

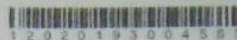
Said, Abdul Rauf Alauddin, *Pembagian kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluasnya Menurut UUD 1945*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum.

- Satori Djam'an dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: Alfabeta, 2014.
- Saudi Ahmad, Sosiologi Hukum. Penegakan Realitas dan Nilai Moralitas Hukum. Jakarta: Kencana, 2002.
- Sewang, Ahmad M., Syamsudduha Saleh, *hubungan agama dan Negara Studi pemikiran politik buya hamka*. Makassar: Alauddin Press, 2011.
- Sjadzali, H. Munawir, *Islam dan tata negara: ajaran, sejarah dan pemikiran*. Edisi 5 Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Sebuah Pengantar* . Jakarta: CV Rajawali 1982.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Syarif, Muja'ib, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. t,t: Erlangga, 2008.
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi, Disertasi, Laporan Penelitian*. Makassar: Alauddin Pers.
- Widjaja, HAW. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqh kulliyat da'wah al Islami*. Jakarta :Radar Jaya Pratama, 1997

LAMPIRAN-LAMPIRAN







PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 4270/S.01/PTSP/2020
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Bone

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor
B-2445/SH.0.1/PP.00.9/07/2020 tanggal 28 Juli 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: ASRIANA
Nomor Pokok	: 10200116091
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa(S1)
Alamat	: Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan
judul :

" PERATURAN DAERAH (PERDA) BERNUANSAGA AGAMA DI KABUPATEN BONE (TELAH ATAS HUKUM
TATANEGARA ISLAM) "


Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 28 Juli s/d 28 Oktober 2020

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan
ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 28 Juli 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu


Dr. JAYADININGSIH, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Penitipg

SMAP PTSP 29-07-2020



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://smap.sulawiprov.go.id> Email : pspp@sulawiprov.go.id
Makassar 90231





PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 Watampone Telp. (0481) 25056

IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/12.794/IX/IP/DPMPTSP/2020

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama : **ASRIANA**
NIP/Nim/Nomor Pokok : 10200116091
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Ulaweng Raja Kec. Amali
Pekerjaan : Mahasiswi UIN Alauddin Makassar

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

**" PERATURAN DAERAH BERNUANSA AGAMA DI KABUPATEN BONE
(Telaah Atas Hukum Tatanegara Islam)"**

Lamanya Penelitian : 07 September 2020 s/d 07 Oktober 2020

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bone
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Watampone, 07 September 2020
Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19660717 198603 1 009

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di Watampone.
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone.
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Bone di Watampone.
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
SEKRETARIAT DPRD KAB.BONE

Jl.Kompleks Stadion Lapatau Watampone Telp. (0481) 21015

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 170 /175/IX/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Dewan Kab.Bone menerangkan bahwa :

Nama	: ASRIANA
NIM	: 10200116091
Program Studi	: Hukum Tata Negara Islam

Adalah benar-benar melakukan penelitian di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhitung sejak tanggal 7 September s/d 7 Oktober 2020 dalam rangka melengkapi skripsi penelitian dengan judul "*Peraturan Daerah Bernuasa Agama di Kabupaten Bone*"

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Watampone

Pada Tanggal : 7 September 2020

SEKRETARIS DEWAN,


DR. H. ABUBAKAR, MM
Pang. Cat. Pembina Utama Muda
NIP. : 19610624 198603 1 010

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Anwar, S.H, M.H.
Tempat/Tanggal Lahir : Bonne-Bonne, 20 September 1976
Jabatan : Kepala Bagian Pengkajian dan Evaluasi
Produk Hukum Daerah Sekretariat DPRD
Kabupaten Bone
Nip : 1976 0920 200604 1 005
Alamat : Kabupaten Bone
2. Nama : A. Dedy Astaman Hamsa, S.H, M.H.
Tempat/Tanggal Lahir : Watampone, 11 Desember 1985
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum, Bag
Hukum Setda Kabupaten Bone
Nip : 1985 1211 201001 1 016
Alamat : Kabupaten Bone
3. Nama : Hj. Adriani A Page, S.E.
Tempat/Tanggal Lahir : Bone, 30 Desember 1975
Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten Bone
Alamat : Kabupaten Bone
4. Nama : Lin Pratiwi, S.E.
Umur : 38 Tahun
Jabatan : Staf Baznas Kabupaten Bone
Alamat : Kabupaten Bone
5. Nama : Puang Rosi
Umur : 57 Tahun
Jabatan : Masyarakat Kabupaten Bone
Alamat : Kabupaten Bone
6. Nama : Indo Tang
Umur : 60 Tahun

Jabatan : Masyarakat Kabupaten Bone

Alamat : Kabupaten Bone

7. Nama : A. Irham

Umur : 28 Tahun

Jabatan : Pegawai Negeri sipil

Alamat : Kabupaten Bone

8. Nama : Majid

Umur : 57 Tahun

Jabatan : Masyarakat yang mendapatkan bantuan
dari program Baznas

Alamat : Kabupaten Bone

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi berjudul, “PERATURAN DAERAH BERNUANSYA SYARIAH DI KABUPATEN BONE (Telaah Atas Hukum Tatanegara Islam)” bernama Asriana, anak kedua dari dua bersaudarah yang lahir dengan cinta dan kasih sayang dari seorang Bapak yakni Bapak

H. Anggu, dan Ibu Hj. Mayang, Lahir di Tanah Cabi 30 Juni 1997, berasal dari Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Tengah.

Penulis memulai pendidikan Petamanya di Sekolah Dasar di SD Inpres 6/80 Ulaweng Riaja pada tahun (2003-2009), penulis melanjutkan tingkat pendidikan disalah satu Sekolah Menengah Pertama yaitu SMP 4 Lilirilau pada tahun (2009-2012), dan kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 lilirilau (2012-2015), dan masuk di Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Bone (2015), pada tahun (2016) melanjutkan perguruan Tinggi disalah satu perguruan tinggi di Makassar, yakni Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Adapun pengalaman Organisasi Penulis yaitu bergabung dengan Ikatan Penggiat Peradilan Semu (IPPS) MCS VII UIN Alauddin Makassar (2016), Pergerakan Mahasiswa Islam (PMII) mengikuti pengkaderan pada tahun 2017, Serta Karang Taruna Desa Ulaweng Riaja Kac. Amali Kab. Bone.

Motto penulis tidak ada impian yang terlalu mustahil terwujud selama mengandalkan Allah dalam setiap sujudmu. Ali bin Abu Thalib berkata “ jika Allah mengabulkan doaku aku berbahagia, tetap jika Allah tidak mengabulkan doaku maka aku lebih berbahagia, karena yang pertama adalah pilihanku, sedangkan yang kedua pilihan-Nya” sandarkan segala sesuatunya hanya Kepada Allah.